

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

East Asia Summit (EAS) sebagai platform dialog lintas negara di kawasan Asia Timur memainkan peran signifikan dalam upaya mempromosikan keamanan dan stabilitas regional. East Asia Summit (EAS) dibentuk pada bulan Desember 2005, yang awalnya beranggotakan sepuluh negara anggota ASEAN bersama dengan Tiongkok, Jepang, Australia, India, Selandia Baru dan Korea Selatan (Emmers et al., 2010). Baru kemudian Amerika Serikat dan Russia bergabung pada 2011. Institusi ini bertujuan untuk mendorong kerja sama regional dan mengatasi berbagai masalah, termasuk tantangan ekonomi dan keamanan (Emmers et al., 2010). Pada mulanya EAS merupakan hasil evolusi dari beberapa institusi yakni Asia Pacific Economic Forum (APEC), Asean Regional Forum (ARF), dan Asean Plus Three (APT). Arsitektur keamanan yang dinamis di Asia Timur, di satu sisi, secara konvensional telah dianalisis melalui lensa kerangka pertahanan bilateral yang dikontraskan dengan perjanjian kerja sama multilateral.

Saat ini EAS didukung oleh anggota-anggota kunci seperti ASEAN, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, serta negara-negara di luar kawasan seperti Amerika Serikat, forum ini menjadi medium untuk mengoordinasikan respons terhadap berbagai ancaman keamanan bersama. Tujuan utama EAS adalah untuk secara kolektif membentuk kawasan Asia Timur, dengan fokus pada pemeliharaan dinamisme ekonomi, peningkatan keamanan regional, dan pemeliharaan perdamaian dan stabilitas (Emmers et al., 2010).

East Asia Summit menghadapi beberapa tantangan, termasuk ketegangan antara regionalisme inklusif dan eksklusif, isu denuklirisasi di Semenanjung Korea,

kontestasi hegemoni Amerika Serikat dan Tiongkok, keseimbangan antara proses dan keanggotaan, serta dinamika sentralitas ASEAN versus kepemimpinan negara-negara besar. Ketegangan ini yang kemudian dapat memengaruhi efektivitas dan arah EAS di masa mendatang (Emmers et al., 2010). Meskipun EAS bukanlah organisasi yang memiliki kekuatan eksekusi langsung, perannya dalam menggalang konsensus dan membangun rasa saling percaya di antara negara-negara anggota tetap strategis, terutama dalam menghadapi tantangan keamanan regional. Sebab, EAS telah secara empirik melalui beberapa evolusi sehingga relevan dalam konteks membangun arsitektur pertahanan kolektif di kawasan.

Spesifik terkait isu yang menjadi perhatian dalam forum adalah denuklirasi Korea Utara. Ketegangan keamanan di kawasan Asia Timur mulai bisa terdeteksi ketika Korea Utara memulai pengembangan senjata nuklirnya pada 1956 yang ketika itu dibantu langsung oleh Uni Soviet (Bolton, 2012). Ketika itu Uni Soviet yang masih berkonflik dengan Amerika Serikat dalam Perang Dingin tentu menambah eskalasi konflik di kawasan Asia Timur. Amerika Serikat yang juga bersekutu dengan Korea Selatan memanfaatkan peluang tersebut untuk mencari simpati negara-negara Asia Timur lainnya untuk mengecam pengembangan nuklir Korea Utara.

Baru ketika Korea Utara akhirnya memutuskan keluar dari Perjanjian Non Proliferasi Nuklir (NPT) pada 2003, dan tiga tahun setelahnya keadaan kian memanas dengan Korea Utara melancarkan tes nuklir pertamanya pada 2006. Sebelum Korea Utara melancarkan tes nuklir pertamanya, pada 2003 upaya untuk memediasi program nuklir Korea Utara dilakukan melalui Six Party Talks, yakni forum yang bertujuan untuk mengakhiri program nuklir Korea Utara melalui

negosiasi yang melibatkan Tiongkok, Amerika Serikat, Korea Utara dan Selatan, Jepang, dan Rusia (Zissis et al., 2013).

Amerika Serikat memiliki kepentingan lebih besar dalam mengawasi program nuklir Korea Utara tersebut. Amerika Serikat terbukti cukup agresif terhadap isu pengembangan Nuklir Korea Utara, sebanyak 28.500 pasukan Amerika Serikat disiapkan untuk bersiaga di Korea Selatan dan Angkatan Laut yang disiagakan di wilayah pasifik (Zissis et al., 2013). Six Party Talks memang berkontribusi cukup signifikan bagi stabilitas keamanan di kawasan yang dipicu oleh program nuklir Korea Utara. Namun kembali, forum tersebut tidak mampu membawa banyak perubahan terhadap larangan pengembangan nuklir Korea Utara. Satu diantara banyak hambatan dari tidak efektif nya Six party Talks adalah karena terlalu majemuknya kepentingan dari ke enam anggota. Terbagi dua nya anggota Six Party Talks kedalam kubu Korea Utara yakni; Russia dan China, serta kubu Amerika Serikat yakni; Jepang dan Korea Selatan, menjadikan forum ini tidak banyak menciptakan banyak progres dan hanya berkuat pada adu kepentingan dua kubu tersebut, tidak lebih dari tensi Perang Dingin, program nuklir Korea Utara tidak mundur bahkan setelah adanya Six Party Talks.

Salah satu upaya dari East Asia Summit adalah untuk meminimalisir ketegangan keamanan yang terjadi akibat adanya ketimpangan kekuatan di kawasan Asia Timur yang dipicu oleh isu denuklirisasi Korea Utara. EAS sebagai platform dialog multilateral menunjukkan kontribusinya dalam membangun kepercayaan dan menciptakan ruang diskusi terkait isu-isu keamanan. EAS, yang melibatkan 18 negara anggota termasuk ASEAN, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Rusia, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru, menyediakan forum inklusif untuk

membahas tantangan keamanan regional. Dalam beberapa pertemuan terakhir, EAS menyoroti isu-isu strategis seperti denuklirisasi Semenanjung Korea. Memang belum ada tindakan tegas berupa *joint statement* dari negara anggota EAS terkait denuklirisasi Korea Utara, namun setidaknya dalam 5 pertemuan terakhir, agenda denuklirisasi Korea Utara menjadi bahasan dalam pertemuan EAS. Melalui mekanisme ini, EAS tidak hanya memperkuat dialog antarnegara tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk membangun norma bersama mengenai stabilitas kawasan.

Tidak jauh setelah Six Party Talks diinisiasi, East Asian Summit terbentuk. Dengan bahasan yang lebih general dibandingkan Six Party Talks, pun keanggotaan yang lebih majemuk, EAS hadir dengan membawa optimisme baru.

Hubungan internasional sebagai sebuah keilmuan mengkaji mengenai bagaimana negara sebagai salah satu aktor berinteraksi dengan aktor lainnya dalam sistem internasional. Interaksi tercipta karena negara dirasa perlu untuk mengamankan eksistensinya dalam sistem internasional yang anarkis (Nye, 1988).

Hal tersebut kemudian mengarah pada interaksi yang kompetitif di mana negara dapat membentuk aliansi atau terlibat dalam konflik berdasarkan penilaian mereka terhadap kekuatan dan ancaman (Nye, 1988). Negara dalam pandangan neorealisme dipandang sebagai aktor utama dalam Hubungan Internasional (Keohane, 1986). Rasionalisasi dari pandangan tersebut adalah bahwa dalam sistem internasional yang anarkis, negara memiliki otoritas tertinggi dalam menegakkan norma dan aturan (Keohane, 1986). Pada dasarnya pandangan bahwa negara sebagai aktor utama merupakan tradisi dari pandangan realisme, di mana negara sebagai entitas rasional yang berusaha memaksimalkan kekuatan dan keamanannya

(Keohane, 1986). Kawasan kerap menjadi objek yang berkaitan erat dengan bagaimana negara bersikap dalam sistem internasional. Konteks kajian hubungan internasional tidak hanya menyoroti keterkaitan antarnegara dalam rangka menjaga stabilitas kawasan, tetapi juga mengeksplorasi mekanisme interaksi antar aktor negara maupun non-negara yang terlibat dalam penyusunan kebijakan keamanan. Kawasan regional Asia Timur merupakan salah satu fenomena empirik yang kompleks dan multidimensi.

Dinamika kekuatan dan distribusi kekuatan menjadi landasan mengapa pandangan neorealisme digunakan dalam memandang isu denuklirisasi Korea Utara yang menyebabkan ancaman terhadap stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur. Perspektif neorealis menjadi relevan dalam penelitian ini karena Asia Timur kerap digambarkan sebagai kawasan dengan kompetisi kekuatan besar yang intens. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya hubungan intens antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang menempatkan kawasan ini dalam pusaran dinamika hegemonik. Neorealisme berpendapat bahwa struktur internasional yang anarkis mendorong negara-negara untuk mencari keamanan melalui kekuatan dan penguatan kapabilitas militer (Keohane, 1986). Maka negara, sebagai aktor utama dalam struktur internasional, beroperasi berdasarkan kepentingan untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang anarkis dan berisiko tinggi (Keohane, 1986). Selaras dengan pandangan tersebut, Nye menekankan bahwa struktur sistem internasional, baik unipolar, bipolar, maupun multipolar, secara signifikan memengaruhi perilaku negara (Nye, 1988). Dalam konteks denuklirisasi Korea Utara, polaritas tersebut kerap memerangui proses penegakan hukum terhadap Korea Utara.

Kompleksitas keamanan di kawasan Asia Timur tentu dilandasi oleh pengaruh kekuatan dan kekuasaan. Namun di sisi lain, terdapat beberapa hal yang dapat dianalisa ketika berbicara mengenai pola tata kelola keamanan di kawasan. Tata kelola keamanan dapat terkonstruksi dalam suatu kawasan seperti yang dikatakan Buzan, melalui perilaku dari aktor-aktor di suatu kawasan (Buzan & Waever, 2003). Paradigma konstruktivisme, sebagaimana dibahas dalam artikel ini, menekankan peran konstruksi sosial, identitas, dan konteks historis dalam membentuk dinamika keamanan antarnegara (Buzan & Waever, 2003). Konstruktivisme berpendapat bahwa keamanan bukan hanya sekadar masalah material, tetapi sangat dipengaruhi oleh identitas dan persepsi negara (Buzan & Waever, 2003). Cara negara mendefinisikan kepentingan dan ancaman mereka dibentuk oleh pengalaman historis, konteks budaya, dan interaksi sosial mereka. Perspektif ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana aktor regional memandang isu keamanan dan menanggapi. Konstruktivisme membantu menjelaskan pembentukan RSC dengan berfokus pada saling ketergantungan dan hubungan antarnegara dalam suatu kawasan. Konstruktivisme mengakui bahwa negara bukanlah entitas yang terisolasi; sebaliknya, mereka adalah bagian dari jaringan hubungan yang membentuk masalah keamanan mereka (Buzan & Waever, 2003). Buzan mencatat bahwa aktor regional memiliki tantangan keamanan dan ikatan historis yang sama, yang berkontribusi pada pengembangan kompleks keamanan regional yang berbeda (Buzan & Waever, 2003).

Memahami adanya kompleksitas keamanan di Kawasan Asia Timur, *Regional Security Complex Theory* (RSCT) dapat memberikan kerangka analisis

yang komprehensif dalam memahami pola interaksi keamanan di Asia Timur. Menurut teori ini, keamanan negara-negara cenderung saling terkait dalam satu kawasan regional, di mana ancaman terhadap satu negara dapat dirasakan sebagai ancaman bagi negara-negara lain dalam wilayah yang sama (Buzan, 2003a). Konsep ini menekankan gagasan bahwa saling ketergantungan keamanan lebih intens di antara negara-negara dalam suatu kawasan tertentu dibandingkan dengan negara-negara di luar kawasan tersebut (Buzan, 2003a).

Teori *Regional Security Complex* (RSC) oleh Barry Buzan memiliki empat struktur analisis meliputi *boundaries*, *anarchic structure*, *polarity* dan *social construction*. Keempat variabel tersebut pada dasarnya menekankan pentingnya interdependensi kekhawatiran keamanan antara negara-negara dalam satu kawasan, di mana ketergantungan ini membentuk pola-pola keamanan tertentu (Buzan, 2003a). Interdependensi tersebut menciptakan pola interaksi spesifik di antara negara-negara yang berada dalam kedekatan geografis satu sama lain, sehingga meningkatkan dampak langsung dari ancaman atau tindakan keamanan di satu negara terhadap negara tetangga. Selain itu, pengaruh kekuatan eksternal seperti negara adidaya dapat memengaruhi dinamika keamanan kawasan, meskipun efeknya sering kali terbatas oleh pola-pola keamanan yang sudah ada (Buzan, 2003a). Kompleksitas keamanan kawasan membentuk pola keamanan yang unik dalam setiap kawasan dan memungkinkan kita mengamati perubahan dari waktu ke waktu dalam respons dan aliansi keamanan antar-negara. Dengan demikian, teori ini menyediakan kerangka untuk studi komparatif, memungkinkan para peneliti untuk membandingkan dinamika keamanan di berbagai kawasan dan memahami karakteristik khusus masing-masing kompleks keamanan regional.

Kompleksitas keamanan di Asia Timur dipengaruhi oleh beberapa faktor, ketegangan dan kedekatan antar negara di Asia Timur yang saling terkait satu sama lain, pengaruh setidaknya dua kekuatan besar seperti Tiongkok dan Jepang, ditambah dengan intervensi dari aktor luar kawasan seperti Amerika Serikat dan Russia, menjadikan kondisi kawasan Asia Timur kian kompleks. Kompleksitas tersebut kemudian dijelaskan oleh Buzan sebagai situasi *supercomplex*, dimana interaksi antarnegara tidak terbatas pada lingkungan regional mereka, tetapi meluas hingga memengaruhi dan membentuk dinamika keamanan di berbagai kawasan (Buzan & Waever, 2003). Hal tersebut menghasilkan konstelasi keamanan yang lebih rumit di mana negara-negara besar memainkan peran utama, dan masalah keamanan di satu kawasan dapat berdampak signifikan pada kawasan lain (Buzan & Waever, 2003). Maka dari situasi *supercomplex* dalam kerangka *Regional Security Complex* dapat menganalisa dinamika keamanan di suatu kawasan menggunakan empat level analisis yakni domestic, regional, interregional dan global. Dengan demikian, RSCT melihat keamanan Asia Timur sebagai suatu kompleks yang memiliki dinamika internal yang kuat, di mana perubahan pada satu negara dapat membawa konsekuensi keamanan bagi seluruh kawasan. Ini relevan dalam konteks East Asia Summit, yang mencoba mengurangi risiko-risiko keamanan melalui upaya membangun kepercayaan dan menciptakan mekanisme koordinasi antar negara.

Lebih jauh mengenai pola interaksi antar aktor, terdapat konsep *amity* dan *enmity* dalam konteks dinamika keamanan. *Amity* dan *enmity* adalah istilah yang menggambarkan sifat hubungan antara negara atau entitas, khususnya dalam

konteks hubungan internasional (Cruden, 2011). *Amity* mengacu pada hubungan yang bersahabat dan harmonis antara negara. Hubungan ini ditandai dengan kerja sama, saling menghormati, dan keinginan untuk hidup berdampingan secara damai. Sedangkan *enmity* menunjukkan permusuhan dan antagonisme antara negara. Hal ini dapat terwujud sebagai persaingan, konflik, atau kompetisi. Konteks historis *enmity* sering kali berasal dari konflik masa lalu, dinamika kekuasaan, dan perbedaan kepentingan nasional. Kedua pola ini berkaitan erat dengan pandangan konstruktivisme. Metode konstruktivis dalam kerangka kerja RSCT menekankan pentingnya keamanan masyarakat, peran objek rujukan dan aktor sekuritisasi, serta sifat politik dari proses sekuritisasi (Buzan & Waever, 2003). Metode ini menganjurkan kerangka kerja analitis terbuka yang memungkinkan pemahaman yang bernuansa tentang isu keamanan dan penelusuran empirisnya dalam konteks regional.

Dalam konteks Asia Timur, negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, serta kehadiran Amerika Serikat, terlibat dalam kompetisi kekuatan guna mempertahankan pengaruh mereka masing-masing. Negara-negara di Asia Timur melihat pembangunan kekuatan militer dan aliansi sebagai alat untuk mempertahankan keamanan dan kepentingan nasional mereka. Sebagai akibatnya, kawasan Asia Timur, khususnya dalam pandangan neorealis, sering kali terlihat sebagai medan persaingan kekuatan yang menimbulkan kecenderungan ke arah dilema keamanan, di mana setiap peningkatan kapabilitas oleh satu negara memicu respons serupa dari negara-negara lain.

Dinamika kekuatan di Asia Timur dibentuk oleh interaksi antara kekuatan yang sedang bangkit dan kekuatan yang memang sudah ada, khususnya dalam

konteks kebangkitan Tiongkok. Analisa tersebut menyelidiki faktor-faktor sistemik yang memengaruhi dinamika kekuatan di Asia Timur, respons berbagai negara, dan implikasinya terhadap stabilitas regional. Jika menganalisa menggunakan pandangan neorealisme, negara-negara adikuasa berusaha untuk mendapatkan hegemoni di kawasan mereka (Mikkelsen, 2024). Di Asia Timur, hal ini secara historis telah diamati dengan Jepang dan Amerika Serikat sebagai aktor dominan regional. Faktor sistemik yang ada di arena internasional sering kali menyebabkan konflik kekuatan besar (Mikkelsen, 2024). Ketika distribusi kekuatan berubah, negara-negara dipaksa untuk bereaksi terhadap perubahan ini, yang dapat meningkatkan ketegangan dan menyebabkan konflik.

Mearsheimer, memberikan gambaran terkait kebangkitan Tiongkok, di mana kondisi damai akan sulit tercipta karena kekuatan Tiongkok yang meningkat pesat dan keengganan Amerika Serikat untuk menoleransi pesaingnya tersebut (Mearsheimer, 2010). Pilihannya ada di antara beberapa pilihan, dengan penataan kembali keseimbangan kekuatan melalui penyeimbangan sebagai yang paling mungkin. Menurut Mearsheimer, beberapa negara lain di kawasan tersebut sudah mulai menahan Tiongkok, termasuk negara-negara kecil seperti Vietnam (Mearsheimer, 2010). Ketakutan akan kebangkitan Tiongkok terbukti menjadi ancaman yang terlalu besar untuk tidak terlibat dalam mekanisme penyeimbangan. Kekhawatiran utama Tiongkok terletak pada domain maritim, karena mereka perlu melindungi jalur komunikasi laut penting yang dapat menjamin keamanan dan pembangunan berkelanjutan bangsa tersebut baik dalam masa damai maupun masa perang. Mearsheimer juga memproyeksikan bahwa, pada akhirnya, sebagian besar negara Asia akan bergabung dengan koalisi penyeimbang yang dipimpin oleh

Amerika Serikat (Mearsheimer, 2010). Koalisi ini akan terdiri dari sekelompok negara yang bersatu, dalam upaya bersama untuk menyeimbangkan dan melawan kekuatan negara dominan yang sedang muncul, sehingga memastikan bahwa keseimbangan kekuatan tetap menguntungkan dan seimbang (Mearsheimer, 2010).

Upaya kolektif dari EAS memang belum secara legal termaktubkan dalam *joint statement*. Namun terpisah dari upaya EAS, beberapa negara anggota EAS melakukan upaya mengatasi isu denuklirasi Korea Utara. Hal tersebut di sisi lain menggambarkan pola regionalisme eksklusif dari negara-negara kawasan asia timur, yang menjadi tantangan dalam membangun struktur internasional yang inklusif. Sebagai contoh, negara-negara seperti Tiongkok dan Jepang, yang terjadi dalam Japan-China Security Dialogue. Ancaman dari pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara tidak hanya menjadi masalah bagi Korea Selatan tetapi juga menimbulkan reaksi keamanan dari Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang pada November 2024 mengeluarkan *joint statement* sebagai buah dari kerjasama trilateral ketiga negara, mengenai respon ketiga negara terhadap hubungan antara Korea Utara dan Russia dalam konflik Russia-Ukraina dan utamanya aktivitas nuklir Korea Utara. Ketiga negara tersebut membentuk Trilateral Leaders' Summit antara Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang, yang semakin menjelaskan intensi ketiga negara tersebut untuk menekan perilaku Korea Utara yang dianggap mengancam stabilitas keamanan kawasan.

Dari dua bentuk kerjasama dari anggota EAS tersebut menunjukkan adanya pola regionalisme yang dapat bertentangan dengan regionalisme inklusif yang coba dibangun dalam EAS. Namun hal tersebut pula mengindikasikan adanya interdependensi kekhawatiran keamanan yang mengacu pada bagaimana ancaman

keamanan di satu negara dapat memengaruhi negara lain dalam kawasan yang sama (Buzan, 2003a). Sebaliknya, semakin banyak akademisi berpendapat bahwa strategi pertahanan dan mekanisme keamanan kooperatif pada dasarnya tidak saling bertentangan; sebaliknya, keduanya dapat dan harus berfungsi sebagai entitas yang saling memperkuat, baik bilateral maupun multilateral, atau seperti yang diutarakan oleh William Tow, "konvergen" (Emmers et al., 2010).

Di sisi lain, EAS yang dipandang dapat menjadi forum strategis untuk memperkuat arsitektur keamanan regional, memiliki kelemahan kelembagaan. Efektivitasnya sering terbatas oleh sifat konsensual dari keputusan yang diambil, yang sering kali tidak memiliki kekuatan mengikat (Emmers et al., 2010). Keberagaman aktor yang terlibat, termasuk kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Cina, dan Rusia, dapat menciptakan perbedaan kepentingan yang sulit dikelola. Ralf Emmers menekankan bahwa meskipun EAS menyediakan kerangka untuk dialog, mekanisme untuk implementasi konkret kebijakan masih kurang, yang mengurangi perannya sebagai platform resolusi konflik yang efektif (Emmers et al., 2010).

Tantangan lain EAS adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan kekuatan besar dan negara-negara kecil. Evelyn Goh mencatat bahwa forum ini sering kali menjadi arena kompetisi geopolitik, terutama antara Cina dan Amerika Serikat, yang dapat menghambat tujuan kolektif dalam membangun keamanan regional (Goh, 2011b). Selain itu, sifat sukarela dari kerja sama dalam EAS juga membuat implementasi kebijakan menjadi lambat. Keterbatasan EAS dalam implementasi kebijakan adalah hasil dari pendekatan ASEAN yang dipimpin (*ASEAN-led approach*). Pendekatan ini sering kali fokus pada dialog tanpa diiringi

dengan langkah-langkah operasional yang jelas (Goh, 2011b). Keanggotaan EAS yang begitu majemuk karena beranggotakan negara-negara berpengaruh di Asia, tidak semata-mata membawa petaka bagi kelangsungan proses pembentukan pola keamanan regional di Asia Timur. Namun keanggotaan Amerika Serikat, Australia, negara-negara ASEAN secara tidak langsung menjadikan EAS lebih fleksibel dalam menciptakan keseimbangan Kawasan, dengan menghadirkan dua pusaran kekuatan yakni Tiongkok dan Amerika Serikat.

Salah satu isu paling mencolok dari kasus denuklirisasi Semenanjung Korea adalah timbulnya polaritas dalam upaya menciptakan stabilitas keamanan kawasan Asia Timur. Program nuklir Korea Utara tidak hanya memengaruhi hubungan bilateral dengan Korea Selatan, tetapi juga memicu reaksi dari Tiongkok, Jepang, Rusia, dan Amerika Serikat. Setiap negara memiliki kepentingan yang berbeda dalam memandang stabilitas kawasan pada isu denuklirisasi Korea Utara, menjadikan penyelesaian isu ini semakin rumit. Dalam konteks ini, RSC membantu menjelaskan bagaimana keamanan di kawasan ini tidak bisa dipisahkan dari hubungan antarnegara, yang dipengaruhi oleh dinamika domestik dan hubungan global. Ketiadaan kepercayaan antara aktor-aktor utama membuat dialog multilateral menjadi kebutuhan yang mendesak untuk menghindari eskalasi konflik.

East Asia Summit (EAS) hadir sebagai platform unik yang mengintegrasikan kekuatan besar dan negara-negara kecil di kawasan dalam dialog keamanan multilateral. Dengan melibatkan berbagai aktor, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Rusia, dan negara-negara ASEAN, EAS mampu menjembatani

perbedaan kepentingan dan menciptakan ruang untuk dialog strategis. ASEAN, sebagai inti dari EAS, memainkan peran penting dalam memastikan inklusivitas dan mencegah dominasi oleh satu kekuatan besar. Dalam kerangka RSC, peran ini signifikan karena dapat membantu menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dan mendorong stabilitas regional melalui norma kolektif.

Pengaruh kekuatan eksternal adalah salah satu indikator yang paling menonjol di Asia Timur. Amerika Serikat, melalui kehadiran militernya dan aliansi dengan Jepang dan Korea Selatan, memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Intervensi eksternal juga terlihat dalam respons terhadap ancaman Korea Utara, di mana PBB yang didukung oleh kekuatan eksternal seperti Rusia dan Amerika Serikat berperan dalam pemberlakuan sanksi ekonomi. Keterlibatan aktor eksternal sering kali memperumit upaya untuk menciptakan tata kelola keamanan regional yang independen.

Tantangan terbesar EAS adalah memastikan efektivitasnya sebagai penggerak kebijakan, mengingat pendekatan yang berbasis konsensus sering kali menghasilkan keputusan yang tidak mengikat secara hukum. Mekanisme ini, meskipun penting untuk inklusivitas, sering memperlambat respons terhadap situasi krisis. Untuk meningkatkan efektivitas, EAS perlu memperkuat mekanisme resolusi konflik, seperti pembentukan panel ahli independen yang dapat memberikan rekomendasi objektif untuk menyelesaikan sengketa regional. Langkah ini akan membantu EAS untuk menjadi lebih proaktif dalam menangani masalah keamanan yang mendesak.

Dalam kerangka RSC, jelas bahwa keamanan di Asia Timur adalah fenomena yang sangat kompleks dan saling terkait. Dengan memperkuat kapasitasnya dalam

memediasi konflik, membangun kepercayaan strategis, dan mengintegrasikan isu-isu lintas sektor, EAS memiliki potensi besar untuk menjadi katalisator utama dalam menciptakan tata kelola keamanan kolektif yang stabil dan berkelanjutan di kawasan Asia Timur.

Tata kelola keamanan regional, sebagaimana dijelaskan oleh Shaun Breslin dan Stuart Croft, berkaitan dengan metodologi yang digunakan oleh aktor dalam wilayah tertentu untuk mengatasi tantangan keamanan melalui kerangka kerja kolaboratif (Breslin & Croft, 2013). Gagasan ini menggarisbawahi pentingnya institusi, norma yang ditetapkan, dan interaksi antar negara dalam mengejar stabilitas (Breslin & Croft, 2013). Tata kelola ini dapat dipengaruhi oleh aktor dominan yang memainkan peran penting dalam membangun otoritas dan norma di antara negara-negara di kawasan tersebut. Dengan begitu, disamping kerangka kerja institusional seperti EAS, kerangka bilateral dan multilateral yang dipengaruhi oleh aktor dominan dalam suatu kawasan dapat menentukan pembentukan tata kelola keamanan regional. Asumsi tersebut diperkuat melalui pandangan Envall yang mengatakan bahwa tata kelola keamanan regional merupakan konsep yang mencakup berbagai praktik dan kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola keamanan di wilayah tertentu (Envall & Hall, 2016).

Secara keseluruhan, tata kelola keamanan di Asia Timur dihadapkan pada tantangan dalam merespons dinamika internal kawasan yang ditandai dengan dilema keamanan, persaingan kekuatan, dan ancaman lintas batas. Upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang bukan hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga kolaborasi diplomatik yang

terlembagakan. Dengan demikian, East Asia Summit menjadi sarana penting dalam membangun tata kelola keamanan yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan lanskap keamanan di kawasan ini.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut “**Bagaimana East Asia Forum dapat Mempromosikan Tata Kelola Keamanan Regional di Kawasan Asia Timur ditinjau melalui Regional Security Complex Theory?**”

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah, maka fokus pada pembahasan adalah bagaimana kemudian East Asia Summit (EAS) sebagai forum kerjasama multilateral dalam bidang keamanan dan kerjasama regional di Asia Timur dapat mempromosikan tata kelola keamanan di tengah kompleksitas hubungan antarnegara di kawasan Asia Timur di Tengah isu denuklirisasi Korea Utara. Efektivitas EAS akan dianalisis melalui berbagai faktor yang mempengaruhinya, termasuk dinamika politik antar anggota, perbedaan kepentingan strategis, serta kemampuan institusional EAS dalam mengatasi isu keamanan yakni denuklirisasi Korea Utara. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi strategi-strategi yang dapat diimplementasikan oleh EAS guna meningkatkan efektivitasnya dalam mendorong tata kelola keamanan yang lebih kohesif dan stabil di kawasan Asia Timur dengan menggunakan teori *Regional Security Complex*. Dalam pembahasannya juga akan menakar pengaruh internal Kawasan dan eksternal Kawasan Asia Timur. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan pemahaman mendalam tentang peran dan batasan EAS dalam memperkuat tata kelola keamanan regional di Asia Timur.

#### **1.4. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, penelitian ini ditulis dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan penjelasan mengenai upaya East Asia Summit dalam menyusun kerangka kerja dalam menciptakan tata kelola keamanan regional.
2. Mengidentifikasi tantangan baik internal maupun eksternal dari Kawasan Asia Timur dalam menciptakan stabilitas keamanan di kawasan di Tengah isu denuklirisasi Korea Utara.
3. Menganalisis polarisasi di keanggotaan EAS terhadap upaya denuklirisasi Korea Utara.
4. Menjelaskan bagaimana teori *regional security complex* dapat menguraikan kompleksitas hubungan antar negara anggota East Asia Summit, serta berbagai dialog dan kerjasama yang tercipta diantara negara anggota dalam upaya mendenuklirisasi Korea Utara.

##### **1.4.2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka dapat diuraikan kegunaan penelitian yang ingin dicapai diantaranya:

1. Secara teoritis, penulis berharap mampu menambah wawasan akan kegunaan teori *regional security complex* dalam menjelaskan kompleksitas keamanan di Kawasan Asia Timur.
2. Secara praktik kegunaan daripada penelitian ini diantaranya:
  - a. Untuk memenuhi prasyarat kelulusan telah menempuh jenjang studi S-1 dengan pembuatan karya tulis ilmiah pada program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan
  - b. Guna memahami dinamika keamanan di kawasan Asia Timur dengan menggunakan institusi East Asia Summit sebagai subjek dalam mengkollektifkan upaya penciptaan tata kelola keamanan regional di Asia Timur.
  - c. Temuan-temuan pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada para civitas akademik untuk mengembangkan strategi yang efektif dan tepat guna untuk memahami dan mengatasi dinamika yang dihadapi negara anggota EAS dalam memetakan tantangan dan ancaman yang ada sebagai landasan bagi EAS untuk mengoptimalkan upaya penciptaan tata kelola keamanan di kawasan Asia Timur